



AGENSI PEMBENTUKAN BATIK SASAMBO SEBAGAI IDENTITAS KULTURAL DI NUSA TENGGARA BARAT

Ria Hikmatul Hayati

Antropologi Budaya, Universitas Udayana, Indonesia

ria.hikmatul11@unud.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 29-11-2025

Disetujui: 30-12-2025

Kata Kunci:

Batik Sasambo

Identitas kultural

Agen perubahan

Konstruksi Identitas

Keywords:

Sasambo Batik

Cultural identity

Agent of change

Social construction

ABSTRAK

Abstrak: Batik tidak hanya dipahami sebagai warisan budaya yang memiliki nilai estetika, tetapi juga sebagai medium simbolik dalam proses pembentukan identitas kultural. Batik Sasambo tidak lahir secara alami di NTB, melainkan lahir dari proses panjang. Titik awal kemunculannya berakar pada institusi pendidikan sebagai ruang produksi dan transmisi budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses kemunculan Batik Sasambo hingga diakui sebagai identitas kelokalan NTB. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui studi pustaka dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan kemunculan Batik Sasambo bukan semata-mata inisiatif dari pemerintah daerah, melainkan melibatkan peran signifikan civitas akademika, khususnya guru-guru yang berasal dari Jawa, sebagai bagian dari program pemerataan pendidikan pada masa Orde Baru. Temuan ini menegaskan bahwa batik tidak sekadar artefak budaya, tetapi juga merupakan praktik kultural yang aktif dalam merespons perubahan sosial. Oleh karena itu, penelitian ini berkontribusi memperluas kajian identitas budaya dengan menempatkan batik sebagai arena representasi dan konstruksi identitas dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia.

ABSTRACT

Batik is not only understood as a cultural heritage with aesthetic value, but also as a symbolic medium in the process of cultural identity formation. Batik Sasambo in West Nusa Tenggara (NTB) did not emerge naturally; rather, it was produced through a prolonged historical process. Its initial development was rooted in educational institutions as spaces for cultural production and transmission. This study aims to analyze the process through which Batik Sasambo emerged and was subsequently recognized as a local identity of NTB. This research employs a qualitative approach through literature review and interviews. The findings indicate that the emergence of Batik Sasambo was not solely an initiative of the local government, but involved the significant role of academic actors, particularly teachers from Java who were part of the educational equalization program during the New Order period. These findings affirm that batik is not merely a cultural artifact, but an active cultural practice that responds to social change. Therefore, this study contributes to the expansion of cultural identity studies by positioning batik as an arena of representation and identity construction within a multicultural society such as Indonesia.



Crossref

<https://doi.org/10.31764/historis.vXiY.ZZZ>



This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

A. LATAR BELAKANG

Batik merupakan salah satu warisan budaya Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai produk estetis, tetapi juga sebagai medium simbolik yang merepresentasikan nilai, identitas, dan struktur sosial masyarakat. Tepat pada 2 Oktober 2009 UNESCO mengakui batik sebagai warisan budaya tak

benda milik Indonesia melalui sidang di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab (UEA) (Galih, 2017). Tanggal itupun kini dijadikan sebagai hari peringatan batik nasional di Indonesia. Sejak saat itu masyarakat mulai terbiasa mengenakan batik, terutama di acara-acara formal seperti di sekolah-sekolah, acara pernikahan (seragam keluarga/tamu), rapat kantor, upacara

resmi pemerintahan, perayaan hari besar nasional, siswa di sekolah, hingga acara adat. Penggunaan batik semakin menguat dengan adanya aturan permendagri 10/2024 dan SE kepala BKN 2/2026 untuk mengenakan batik bagi pegawai pemerintah di setiap hari Kamis dan Jum'at. Seiring berjalannya waktu, batik kini tidak lagi dianggap sebagai bagian dari budaya tinggi, melainkan budaya masyarakat Indonesia yang lebih fleksibel dan modern, terlebih lagi pola dan corak batik yang terus beradaptasi dengan perkembangan mode masa kini (Zuhro, 2024).

Dalam perkembangannya, batik tidak hanya berfungsi sebagai simbol tradisi yang melekat di tubuh manusia atau sebagai pakaian, tetapi juga telah mengalami proses reinterpretasi dalam konteks modern dan kontemporer. Studi mengenai penggunaan motif batik dalam revitalisasi interior Gedung Sarinah Jakarta menunjukkan bahwa batik dimanfaatkan sebagai simbol representasi budaya nasional dalam ruang modern. Artinya, penggunaan batik tidak hanya berhenti pada diri manusia, tetapi telah meluas pada keindahan sebuah tempat. Hal ini menegaskan bahwa batik memiliki fleksibilitas makna dan mampu menjembatani tradisi dengan kebutuhan representasi identitas di ruang publik kontemporer (Fikriyah, 2025).

Sejumlah kajian menunjukkan bahwa motif batik dapat dibaca sebagai teks budaya yang menyimpan makna kultural, filosofis, dan ideologis dari komunitas pembuatnya. Dalam konteks ini, batik berperan sebagai sarana representasi identitas budaya lokal yang terus mengalami transformasi seiring perubahan sosial dan kultural (Baehaqie, 2025). Batik Minang misalnya, tergambar motif rumah gadang, ukiran Minangkabau, pola-ola simetris yang berulang, lalu bunga-bunga, padi dan tumbuhan ladang. Pola dan motif itu mewakili kehidupan masyarakat yang memiliki adat matrilineal, menyimbolkan keseimbangan dalam hidup, juga menggambarkan ketergantungan manusia Minangkabau terhadap alam (Putri, 2021). Lalu ada pula batik Lebak yang menonjolkan motif *Leut Baduy* atau gambar lumbung padi menyimbolkan ketahanan pangan dan rasa cukup, *Kaso Rancak* mencerminkan nilai kebersamaan masyarakat Lebak, dan *Seren Taun* menjadi simbol rasa syukur atas hasil panen yang melimpah

(Kapeanis, 2025). Jika mengarah ke arah Timur Indonesia, ditemukan pula pola dan motif batik Maluku yang sarat makna, muncul motif pala dan cengkeh sebagai simbol kekayaan melimpah yang dimiliki Maluku, motif Tifa atau alat musik tradisional Maluku melambangkan simbol media ekspresi kolektif lintas kelompok, lalu motif Parang Salawaku atau senjata tradisional yang menyimbolkan keberanian dan perlindungan (Candra, 2023).

Motif yang disebutkan di atas merupakan sebagian kecil dari ratusan motif yang tersebar di Indonesia. Motif dan pola yang tergambar dalam sehelai kain batik tersebut memang harus diakui sebagai hasil konstruksi dan kesepakatan dari sebagian kecil masyarakat, terutama pengrajin yang memproduksi pola, corak dan warna batik. Batik tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial dan ideologis. Kajian estetika kritis terhadap motif batik Joyo Harjo memperlihatkan bahwa batik dapat merefleksikan relasi kuasa, selera dominan, serta ideologi tertentu yang berkembang dalam masyarakat. Dengan demikian, batik tidak bersifat netral, melainkan merupakan produk budaya yang lahir dari proses seleksi makna dan nilai yang dipengaruhi oleh konteks sosial tertentu (Baihaqie, 2025). Namun tidak dapat disangkal pula, pengrajin batik suatu daerah biasanya telah hidup di tengah masyarakat dan menjadi bagian dari alamnya sekaligus (Dewi, 2020). Meskipun simbol visual batik tidak dapat menggambarkan kehidupan masyarakat atau lingkungan secara menyeluruh, namun batik telah menjadi media baru yang mengekspresikan makna budaya, alam hingga kehidupan masyarakat lokal di sebuah daerah.

Dalam konteks Nusa Tenggara Barat (NTB), batik Sasambo hadir sebagai representasi identitas kultural yang khas. Kajian Safitri (2017) menunjukkan bahwa batik Sasambo mengandung simbol-simbol budaya lokal yang merefleksikan identitas dan nilai masyarakat NTB. Batik Sasambo mengintegrasikan unsur budaya tiga etnis utama di NTB, yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo yang berakronim menjadi SASAMBO ke dalam satu narasi visual (Hayati, 2018). Lebih jauh, batik Sasambo memiliki fungsi sosial dan kultural yang signifikan dalam kehidupan masyarakat. Studi Shah (2025) mengungkapkan bahwa batik Sasambo berfungsi sebagai simbol identitas daerah, media pewarisan

nilai budaya, serta sarana penguatan rasa kebersamaan masyarakat. Fungsi ini menunjukkan bahwa batik Sasambo tidak hanya hadir sebagai produk kriya, tetapi juga sebagai medium representasi identitas kolektif yang dilekatkan pada masyarakat NTB.

Namun, kajian mengenai batik selama ini cenderung berfokus pada aspek estetika, makna simbolik, dan fungsi tradisional sebagai warisan budaya. Meskipun pendekatan tersebut tetap penting dalam upaya pelestarian budaya lokal, perspektif tersebut belum sepenuhnya menjelaskan bagaimana batik hadir dan dijadikan sebagai salah satu simbol identitas ke-NTB-an dalam proses sosial yang lebih luas. Dalam konteks masyarakat yang semakin dinamis, artefak budaya tidak lagi dapat dipahami sebagai objek statis, melainkan sebagai hasil praktik sosial yang sarat dengan kepentingan dan representasi. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih kritis untuk melihat batik sebagai bagian dari proses konstruksi identitas yang terus berkembang mengikuti perubahan sosial.

Oleh karena itu, tulisan ini penting untuk mengkaji Batik Sasambo tidak hanya sebagai produk budaya atau artefak saja, tetapi juga bagaimana proses pembentukan identitas kultural masyarakat NTB terbentuk. Melalui analisis konstruksi identitas, penelitian ini berupaya menunjukkan bahwa identitas budaya bukanlah entitas yang statis, melainkan terus diproduksi, dilegitimasi, dan dinegosiasikan dalam dinamika sosial yang melibatkan berbagai aktor dan perubahan zaman. Batik Sasambo menjadi representasi simbolik dari upaya menyatukan keberagaman etnis Sasak, Samawa, dan Mbojo, sekaligus memperlihatkan bagaimana budaya lokal dapat bertransformasi menjadi identitas kolektif yang diakui secara sosial dan institusional.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif kajian budaya untuk menganalisis Batik Sasambo sebagai medium representasi dan konstruksi identitas kultural masyarakat NTB. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami makna simbolik, praktik sosial, serta dinamika budaya yang melekat dalam produksi dan penggunaan batik.

Secara teoretis, penelitian ini mengacu pada teori konstruksi Anthony Giddens yang memandang realitas sosial tidak terbentuk semata-mata oleh struktur yang bersifat memaksa, maupun oleh tindakan individu secara bebas. Keduanya berada dalam hubungan timbal balik yang disebut sebagai dualisme struktur (*duality of structure*). Struktur sosial yang mencakup aturan, sumber daya, dan institusi baik membatasi maupun memungkinkan tindakan para agen. Pada saat yang sama, struktur tersebut direproduksi dan diubah melalui praktik sosial yang berulang (Giddens, 2004). Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-interpretatif dengan fokus pada bagaimana identitas kultural dikonstruksi melalui praktik produksi batik.

Data penelitian diperoleh melalui telaah pustaka dan wawancara mendalam (*in-depth interviews*) dengan pengrajin Batik Sasambo sebagai informan utama. Pengrajin dipilih secara purposif karena memiliki pengetahuan langsung mengenai proses kreatif, pemilihan motif, serta nilai-nilai budaya yang diartikulasikan dalam batik. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur guna memberikan ruang bagi informan untuk menjelaskan pandangan dan interpretasi mereka terkait identitas budaya yang direpresentasikan melalui batik.

Teknik analisis data dilakukan secara tematik melalui tahapan reduksi data dan interpretasi makna. Analisis diarahkan untuk mengidentifikasi siapa saja yang berperan dalam proses konstruksi identitas budaya lokal NTB.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Masuknya Batik Sasambo di NTB melalui Jalur Pendidikan

Berdasarkan hasil identifikasi terhadap sumber data penelitian, masuknya batik Sasambo di NTB ditemukan beberapa tahapan. Berikut ini tahapan yang dilalui batik Sasambo sehingga menjadi identitas NTB berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan.

1) Titik Balik Batik Sasambo di SMKN 5 Mataram

Sebelum dikenal sebagai Identitas NTB, batik Sasambo merupakan bagian dari komponen pelajaran di jurusan Seni Kriya Sekolah Menengah Kejuruan (SMKN) 5 Mataram. Namun, semenjak presiden Indonesia periode 2009-2014, Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan batik sebagai

pakaian nasional, pihak SMKN 5 Mataram mulai membuka ruang bagi batik Sasambo ke ranah publik, misalnya membawa batik Sasambo ke pameran-pameran fasyien dan kriya di sekitaran NTB. Dalam sebuah pameran di Universitas Mataram tahun 2010, batik Sasambo mendapatkan titik temu dengan Wakil Gubernur (Wagub) NTB periode 2008-2013, Badrul Munir (*Wawancara dengan Pak Ahyar, 2018*).

Alhasil, dari pertemuan itulah, Wagub NTB membangun anjang-angcang untuk menjadi Batik Sasambo sebagai produk budaya asli NTB sekaligus cerminan NTB secara umum. Keputusan Wagub ini bersandar pada surat edaran pemerintah pusat soal pemberitahuan bahwa batik telah diakui UNESCO sebagai budaya tak benda milik Indonesia. (*Wawancara dengan pihak Dinas Koperasi dan UKM, 2018*).

Keputusan Wagub NTB tersebut menjadikan SMKN 5 Mataram dijuluki SMK Batik Sasambo. Dalam konteks ini, batik Sasambo mencerminkan bahwa kehadirannya sebagai representasi identitas budaya NTB bukan hasil dari instrument yang diciptakan pemerintah saja, melainkan juga berasal dari dunia pendidikan. Secara sederhana, alur kebijakan muncul dari pemerintah, namun eksekutornya berasal dari dunia pendidikan. Dalam kasus batik Sasambo, dunia pendidikan mendahului instrument pemerintah. Hal ini sejalan dengan yang dikatakan oleh Fierre tentang bagaimana pendidikan tidak hanya berfungsi mereproduksi nilai dominan saja, melainkan juga sebagai ruang transformasi budaya melalui proses penyadaran kritis, pemainnya adalah guru. Mereka tidak ditempatkan sebagai otoritas tunggal pengetahuan tapi lebih ke agen perubahan yang memfasilitasi dialog, refleksi, dan pembentukan kesadaran sosial peserta didik. Maka dari itu, guru memiliki peran dalam mentransformasi dan menelurkan praktik budaya.

Munculnya batik dari dunia pendidikan ini tidak dapat dilepaskan begitu saja dari pandangan kita terhadap sistem pendidikan Indonesia yang sentralistik. Dalam kasus ini, andil pemerintahan Orde Baru dalam program lanjutannya sekitar dari tahun 1980-1993 mengirim guru-guru dari Jawa ke seluruh penjuru negeri dengan berbasis pada alasan pemerataan pendidikan. Jika ditilik lebih dalam, pemilihan "batik" sebagai bagian dari Jurusan Seni Kriya di SMKN 5 Mataram merupakan pilihan

subjektif dari guru-guru yang ada di sana, di tengah pilihan lain, semisal tenun NTB. Terlebih masyarakat NTB telah mengenal tenun jauh sebelum batik.

Dari hasil wawancara dan kajian di SMKN 5 Mataram, ditemukan bahwa guru-guru seni kriya SMKN 5 Mataram memiliki tim solid, yang terdiri dari Pak Ahyar Suharno yang menduduki menduduki posisi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Industri dan Masyarakat dan Bu Husnul berasal dari Yogyakarta, Ibu Wiwi Endang Sridwiyatami yang menduduki posisi sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dari Solo, Ibu Salmah yang menduduki posisi sebagai Ketua Kompetensi Keahlian Kriya Tekstil berasal dari Makassar, dan Ibu Nursetiati berasal dari Surabaya dan Pak Mamiq berasal dari Lombok. Keadaan ini mengindikasikan bahwa posisi batik Sasambo dipengaruhi oleh keberadaan guru seni kriya yang menjabat di sekolah, hampir semua berasal dari Jawa. Keberadaan mereka hingga dapat menjejakkan kaki di NTB adalah bagian dari program pemerintah Orde Baru dalam pemerataan pendidikan. Guru jurusan seni kriya yang sekaligus menjabat dalam struktur sekolah di SMKN 5 Mataram dapat dikatakan sebagai pembuka jalan, sehingga mereka terkoneksi dan memiliki keinginan yang sama dalam memunculkan batik di sekolah. Dengan begitu, mereka dapat mengontrol apa saja yang perlu dan tidak perlu dikembangkan di sekolah.

Giddens menyebut kekuatan semacam ini sebagai "sarana untuk menyelesaikan sesuatu" (Giddens, 1984), yang dieksekusi melalui "*resources*" atau sumber daya. Kali ini, posisi guru SMKN 5 Mataram menggunakan dua sarana yang disebutkan Giddens sekaligus, yaitu sumber daya otoritatif yang tampak pada keberhasilan para guru tersebut dalam mengendalikan tindakan orang lain, dalam hal ini tindakan pihak sekolah untuk tetap mengembangkan batik Sasambo dan kebebasan mereka dalam mengontrol hal-hal yang berkaitan dengan produksi, penjualan, tenaga kerja, dan sebagainya. Di sisi lain, semua guru jurusan seni kriya juga memanfaatkan sumber daya alokatif yang terlihat pada pemanfaatan materi siap pakai di sekolah, seperti alat dan bahan membatik yang disediakan untuk menopang percepatan usaha batik. Guru-guru ini terbantu dengan materi siap pakai yang ada, sebab alat dan

bahan membatiklah yang memiliki perlengkapan komplis diantara komponen lain.

Selain itu, jabatan yang diduduki ketiga guru jurusan Seni Kriya membuat mereka leluasa mengambil peran dalam regulasi sekolah, termasuk dalam penyusunan RPP dan silabus. Giddens menyebut keadaan semacam ini sebagai keuntungan bagi agen, sebab tujuan agen akan berjalan efektif ketika tergabung dengan struktur (Giddens, 1984). Bagi Giddens, struktur bukan hanya aturan tetapi "*rule-resource sets*". Dengan kata lain struktur juga merupakan sumber daya (1984). Dengan demikian, ada kebebasan yang diberikan kepada agen untuk mempengaruhi struktur kapan pun mereka menginginkannya. Dalam kasus ini, semua guru telah memperoleh dimensi yang sama di sekolah, yaitu berupa keistimewaan karena memiliki jubah sebagai pendidik dan pengajar. Adapun tiga guru yang menjabat tadi memiliki akses yang lebih luas untuk bersentuhan dengan hal-hal yang berbau aturan untuk memilih mana yang sebaiknya dikembangkan. Akses yang ada mau tidak mau berpengaruh pada legitimasi yang mengatur sekolah dalam satuan sistem pendidikan nasional.

Bahkan, dukungan atas pengukuhan batik di SMKN 5 Mataram semakin menguat dengan adanya kepala sekolah yang juga berasal dari Jawa, Pak Tri Budi Ananto yang telah menjabat sejak sebelum batik Sasambo dimunculkan, yaitu dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2017. Dalam kondisi ini, kepala sekolah SMKN Mataram mengambil peran terkuat dalam mendorong cita-cita guru seni kriya dalam menciptakan batik Sasambo. Meskipun tidak bisa dipungkiri bahwa ada guru lain yang berasal dari etnis non-Jawa. Akan tetapi, jumlahnya lebih kecil dibandingkan jumlah etnis Jawa. Berkaitan dengan kondisi semacam ini, Giddens menyebutnya sebagai hubungan regulatif antara otonomi dan ketergantungan. Hubungan ini ia sebutkan selalu bersifat dua arah, sebab bawahan yang memiliki hubungan dengan atasan dalam sistem sosial memiliki sejumlah kekuatan tertentu untuk membangun sumber daya. Dengan begitu, ada dialektika kontrol dalam kolektivitas kesukuan sesama Jawa antara agen atau agen dan kekuasaan (Giddens, 1979: 6). Karenanya, dapat dipahami perbandingan jumlah tadi semacam membuka kemungkinan bahwa meskipun etnis Jawa menjadi minoritas di tengah-tengah mayoritas, tetapi

kekuatannya lebih tinggi dibanding mayoritas, karena mereka bisa masuk dalam regulasi sekolah dan dipermudah oleh adanya seorang pemimpin sekolah yang berasal dari etnis yang sama. Selain itu, kondisi ini juga dapat dipahami bahwa sekelompok orang yang berasal dari etnis yang sama mengonstruksi penciptaan simbol budaya di tempat baru dengan berdasar pada ikatan personal maupun kelompok.

2) Kemuculan Batik Sasambo di SMP 7 Pujut

Berbeda dengan peran guru yang berasal dari SMKN 5 Mataram, Pak Samsir yang juga berperan dalam mengembangkan batik Sasambo tidak memiliki daya dukung struktur ketika pertama kali menciptakan batik di NTB. Ia bukan lulusan sarjana, melainkan hanya berbekal ijazah SMA di sebuah sekolah di Yogyakarta. Karenanya, pada saat awal kedatangannya di NTB, Ia tidak bisa melakukan hal serupa untuk menjadi tenaga profesional. Hal ini memaksanya harus bertahan hidup di daerah baru, bukan hanya bertahan dengan kemampuan ekonomi, tetapi juga berupaya untuk memperoleh penerimaan masyarakat setempat.

Semboyan Jawa yang Ia pegang, "*jerbasuki mowo beo*", yang berarti setiap kesuksesan yang ingin dicapai membutuhkan modal dan pengorbanan, membawanya pada pilihan menciptakan kursus membatik gratis. Ia menyasar muda-mudi yang ada di sekitar tempat tinggalnya, di Desa Sade, Pujut, Lombok Tengah. Kursus yang Ia berikan tidak hanya gratis dari segi jasa, melainkan gratis menggunakan sarana prasarana membatik yang Ia miliki, juga memberikan makanan gratis. Dengan cara itu, Ia berhasil menggaet perhatian 25-30 pemuda pemudi di sekitar tempat tinggalnya.

Pilihannya untuk menekuni batik sebagai suatu pekerjaan yang bisa "menyelamatkan" hidupnya di daerah baru dapat dipahami sebagai bonus dari kesetiaannya pada budaya Jawa. Kondisi ini juga menggambarkan bahwa Pak Samsir secara sadar berkorban dan mengeluarkan modal agar bisa diterima oleh masyarakat setempat.

Akan tetapi, kedekatannya dengan budaya Jawa mempengaruhinya memilih batik sebagai sebuah keterampilan. Dengan membawa serta pepatah Jawa sebagai bagian dari prinsip hidupnya, juga semakin menunjukkan bahwa pada kenyataannya Ia tidak bisa lepas dari latar belakang etnisnya. Rasa setia

pada budaya ini memberikan efek pada orang yang bahkan telah lama meninggalkan budaya asalnya untuk membawa budaya itu pada kehidupan dan lingkungan barunya. Di sini terlihat tindakan Pak Samsir sebagai bentuk keinginannya untuk tetap pada jalur yang sama meskipun Ia tidak lagi tinggal di Jawa.

Namun, jika dibaca secara jujur, pilihannya untuk mengembangkan batik di Desa Sade dan menyasar masyarakat di desa itu tampak bertolak belakang karena Ia menuangkan kebanggaannya terhadap batik di tengah-tengah masyarakat penenun. Masyarakat penenun memang hanya mendiami satu kawasan saja, akan tetapi masyarakat yang tinggal di seluruh desa tersebut telah menjadikan tenun sebagai bagian dari hidup dan mati mereka, khususnya perempuan. Desa Sade, sejak dahulu hingga peneliti mengambil data di desa ini, yaitu pada bulan Januari tahun 2018, masih menetapkan peraturan mengikat bagi perempuan melalui kain tenun. Perempuan di desa itu hanya boleh menikah setelah mereka mampu menghasilkan dua helai kain tenun; satu untuk dirinya dan satu lagi untuk suaminya. Jika ada perempuan yang tidak memenuhi persyaratan itu, atau memutuskan menikah sebelum bisa menenun, maka Ia secara pasti memperoleh hukuman berupa sanksi sosial. Ia dikucilkan, dianggap tidak menghargai warisan budaya yang diwariskan turun temurun, dan dianggap sebagai seorang pembangkang oleh masyarakat setempat. Sanksi yang seperti ini lebih berat dari sanksi apa pun, sebab masyarakat desa tersebut masih memegang teguh asas kekeluargaan. Tidak hanya itu, pada saat upacara pernikahan masyarakat di desa tersebut, pihak laki-laki membawa beberapa tenun sebagai persembahan untuk keluarga mempelai perempuan. Di sini tenun dijadikan sebagai simbol penghormatan bagi perempuan. Oleh sebab itu, perempuan di sekitar tempat tersebut mulai belajar menenun sejak menginjak usia Sekolah Dasar. Demikian pula dengan perempuan yang menikah dengan laki-laki yang berasal dari Desa Sade dan memutuskan untuk tinggal di desa itu, maka Ia juga diharuskan belajar menenun sebagaimana perempuan pada umumnya (Hayati, 2018).

Dengan demikian, keberhasilan Pak Samsir dalam mengenalkan batik pada masyarakat Desa

Sade dapat mencerminkan bentuk penerimaan masyarakat di desa tersebut terhadap kehadiran batik dan masyarakat suku Jawa. Secara lebih konkret, penerimaan masyarakat tampak pada 10 orang pekerja tetap Pak Samsir yang memutuskan untuk menekuni dunia membatik. Mereka semua merupakan alumni peserta pelatihan membatik yang dahulu pernah dilakukan. Membatik menjadi pilihan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Meminjam istilah Giddens, Pak Samsir telah berhasil memperoleh penerimaan masyarakat melalui akses komunikatif yang ia miliki. Selanjutnya, sebelum menciptakan dominasi, ia mendayagunakan *skill* dan ekonominya berupa uang agar perhatian masyarakat tertuju pada dirinya dan kemampuan membatik yang Ia miliki. Puncak penerimaan masyarakat itu ditandai dengan tawaran kepala sekolah SMP 7 Pujut untuk menjadikannya seorang guru Muatan Lokal (MULOK) membatik. Tanggapan Pak Samsir mengenai hal ini, seperti hasil wawancara berikut.

"Saya ditawari kebetulan dekat dari rumah, dik"
(Wawancara, 11 April 2018).

Jawaban Pak Samsir ini tidak hanya masalah jarak dekat atau jauh keberadaan dirinya dari sekolah, tetapi karena ia ditawarkan menjadi seorang guru karena adanya signifikasi atau kekuatan simbolik yang telah Ia miliki, sehingga meskipun tempat tinggalnya tidak di desa itu, Ia akan tetap ditawarkan mengajar membatik. Pada level ini, keterampilan menjadi hal yang penting, terlebih jika apa keterampilan yang dimiliki telah bertautan dengan kemampuan komunikatif, maka sudah tentu agen akan terbawa ke arah legitimasi. Hal ini berpengaruh pada pemerolehan akses yang lebih besar untuk memastikan posisinya di tengah-tengah masyarakat dan memperluas arah penjualan produk batik miliknya. Profesi guru yang ditawarkan kepadanya sekaligus sebagai berkah tersendiri. Hal ini tampak pada sasaran penjualan produk batik Sasambo milik Pak Samsir hanya sampai pada toko suvenir dan toko oleh-oleh. Namun setelahnya, produk batik miliknya dapat menyentuh pembeli dari kalangan dinas pemerintah terutama guru.

Selain itu, ketika Pak Samsir masuk dalam sistem pendidikan, Ia secara langsung berhadapan dengan *duality* struktur yang disebut Giddens. Dalam satu keadaan, struktur dapat mengekang sekaligus memberi kesempatan. Kondisi ini terlihat pada aturan konvensional yang sah tentang legalitas mengajar bagi seorang guru telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, yaitu *"Seseorang yang telah memperoleh ijazah atau sertifikat pendidik, minimal Diploma 4 dan sarjana (S1)"*. Aturan yang diatur dalam Undang-undang semacam itu mengekang bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Akan tetapi, aturan tersebut tampak tidak berlaku pada Pak Samsir. Ia tidak menggunakan ijazah, Ia pun tidak mengajukan diri melainkan ditawarkan dengan alasan Ia merupakan satu-satunya orang yang memiliki kemampuan membatik di daerah Lombok Tengah. Pak Samsir berdiri pada posisi "khusus", sehingga ia dapat menembus jeruji struktural itu. Tawaran itu pun jauh setelah tenaga profesional tidak lagi dikirim dari Jawa, semenje Pasca diangkat menjadi guru pada tahun 2006, Ia kemudian melanjutkan pendidikan sarjana ke Universitas Nusa Tenggara Barat (UNTB) pada tahun 2008. Posisinya kali ini memberinya kesempatan untuk lebih leluasa dalam memproduksi, bahkan mempengaruhi pemerintah untuk mengukuhkan keberadaan batik Sasambo di NTB.

Kondisi yang dilalui Pak Samsir sepiantas seperti sebuah historis kebetulan saja; kemampuan Pak Samsir bertemu dengan keinginan sekolah untuk menghadirkan bahan pembelajaran Muatan Lokal membatik. Namun, dalam perkembangannya Pak Samsir tampak berupaya untuk mengembangkan produk batik dengan pola *hybrid*. Hibriditas pada batik di NTB terlihat dari percampuran motif tradisional masyarakat NTB, yang dalam kondisi tertentu sebetulnya tidak bisa dicampur adukkan. Hal ini karena Suku Sasak, Samawa, dan Mbojo memiliki sosial budaya yang berbeda (Kartiwa, 1973).

Posisi Pak Samsir di Desa Sade merembet ke level yang lebih luas, bahkan ke tingkat nasional. Namanya semakin dikenal karena presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2013 memberikan penghargaan kepada Pak Samsir sebagai pelopor batik Sasambo di NTB. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diperoleh Pak Samsir.

Berikut sertifikat penghargaan yang diperoleh pak Samsir.



Gambar 1. Sertifikat Penghargaan kepada Samsir sebagai Pelestari Batik Sasambo (Sumber: foto pribadi)

Penghargaan itu sebagai salah satu cara Pak Samsir untuk mengemas pendekatan dan pengaruhnya di tempat tinggalnya saat ini. Penghargaan itu juga dijadikan sebagai bukti otentik kemampuannya dalam membatik, atau meminjam bahasa di sertifikat tadi, "mengembangkan" batik. Ini dapat dipahami bahwa batik Sasambo yang diakui presiden lah yang bisa disebut sebagai pelopor, inisiator ataupun dengan bahasa sederhana "Raja Batik Sasambo" di NTB. Karenanya, sejak saat itu batik Sasambo Rambitan milik Pak Samsir bisa bertengger di toko oleh-oleh maupun di *leaflet* atau selebaran kecil yang dikeluarkan dinas Perindustrian kota maupun provinsi. Pemerintah, dalam hal ini Susilo Bambang Yudhoyono melalui Yayasan Batik Indonesia menyematkan kata "pelopor" pada Pak Samsir. Kata tersebut merujuk pada keberhasilan Pak Samsir sebagai anggota masyarakat yang berhasil melakukan "sesuatu", sehingga masyarakat yang berada di daerah NTB sekalipun mengenal batik sekaligus memiliki batik sendiri.

Dari sisi kepala sekolah SMP 7 Pujut yang menawarkan kesempatan mengajar untuk Pak Samsir, Pak Baku Susikyatno, juga terlihat bahwa tawaran itu tidak terlepas dari ideologi yang telah lama melekat, khususnya dalam memaknai batik sebagai warisan budaya yang memiliki posisi istimewa di daerah asalnya, yaitu Jawa. Selain itu, kepala sekolah yang merekrut Pak Samsir juga merupakan kepala sekolah yang dikirim pemerintah melalui Dinas Pendidikan pada masa presiden Suharto untuk menjadi guru di Lombok. Orde baru kala itu menciptakan satu set penyeragaman penggunaan batik sebagai bentuk kendali pada Pegawai Negeri Sipil (Ramadhan, 1992). Oleh karena

itu, meskipun Pak Samsir ditawarkan mengajar membatik jauh sebelum Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan Hari Batik Nasional, kepala sekolah yang merekrutnya secara tidak sadar membawa ideologi pemerintah yang telah lama tertanam. Pemilihan itu tampak seperti keputusan yang tidak mempertimbangkan keberadaan tenun yang lebih dekat dengan siswanya, terlebih lagi kampung tenun atau pusat kerajinan tenun di Desa Sade berjarak 700 meter-an dari SMP 7 Pujut.

Namun di sisi lain, latar belakang pengetahuan dalam penyeragaman pada masa Orde Baru dan latar belakang etnis mempengaruhi alam bawah sadar mereka dalam mengembangkan batik. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kepala sekolah lebih memilih batik dibanding tenun yang dimasukkan dalam mata pelajaran di sekolah. Keputusan-keputusan itu mau tidak mau berdampak pada keberadaan tenun karena tidak memiliki ruang yang sama dengan batik, baik di level daerah maupun level nasional.

Inisiasi Pemerintah dalam Pembentukan Identitas NTB Dinas Perindustrian

Dinas Perindustrian sebelumnya berada di bawah payung yang sama dengan Dinas Perdagangan (DISPERINDAG), yaitu di bawah naungan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Namun pada 2017 dinas ini terpecah menjadi dua, yaitu Dinas Perindustrian dan dinas perdagangan. Kedua dinas ini memikul tupoksi yang berbeda; dinas perindustrian menangani pengembangan usaha rakyat dari bahan baku menjadi bahan mentah, sementara dinas perdagangan menangani produk yang berpotensi ekspor. Disperindag NTB tahun 2009 memegang wewenang penuh terhadap keberadaan batik Sasambo, khususnya bidang yang mengangkat nama batik Sasambo ke permukaan, yaitu bagian Pengembangan Industri Kecil yang dipimpin oleh Dra. Nuraida. Tanpa dinas ini, barangkali pengrajin batik, seperti dua agen yang telah disebutkan tadi belum bisa melakukan ekspansi dalam mengenalkan batik di luar zona mereka karena terkendala pada minimnya penyokong dari belakang kala itu.

Wakil gubernur memang secara eksplisit mengesahkan batik Sasambo sebagai ikon NTB. Namun proses yang harus dilalui batik Sasambo

sebelum momen pengesahan itu berlangsung ditangani sepenuhnya oleh dinas Perindustrian. Prosesnya dimulai dari inisiatif bagian Pengembangan Industri Kecil untuk mengajukan batik Sasambo ke Sekretaris Daerah agar memperoleh perhatian khusus. Kemudian, di Sekretaris Daerah, penanganannya dilakukan oleh asisten bidang ekonomi. Setelah itu barulah diajukan ke kepala Sekretaris Daerah. Sebelum kepala Sekretaris Daerah mengajukan berkas-berkas ke Wakil Gubernur NTB, kepala Sekretaris Daerah akan meninjau ulang dengan mengembalikannya ke asisten.

Proses yang cukup alot ini dapat dipahami sebagai upaya keseriusan Disperindag dan pihak pemerintah daerah NTB dalam “mengurus” batik Sasambo. Selain itu, disini juga tampak kepentingan yang bersifat dua arah; Dinas Perindustrian ke Wakil Gubernur dan sebaliknya. Selain memperoleh peluang untuk menambah jumlah Industri Kecil dan Menengah di NTB, batik Sasambo juga sekaligus sebagai bentuk langkah Disperindah dalam mengambil peran untuk mengangkat budaya nasional yang pada waktu itu tengah gencar digalakkan pemerintah pusat. Tindakan ini memungkinkan adanya klaim positif terhadap kinerja pemerintah; Dinas Perindustrian memperoleh citra baik dari Kementerian Perindustrian karena berhasil menghadirkan produk nasional di NTB. Sementara wakil gubernur menanam kenangan pada masyarakat mengenai perannya dalam membentuk batik Sasambo yang merangkul tiga suku besar. Sementara di sisi lain, surat-menyurat ataupun berkas pengukuhan batik Sasambo hanya sampai di tangan wakil gubernur. Hal ini bukan karena gubernur tidak berhak mengurus ranah yang demikian, tetapi karena sejak awal wakil gubernur yang dengan tangan terbuka menerima batik Sasambo.

Maka dari itu, salah satu tindakan resmi yang tampak dalam mengukuhkan posisi dan citra batik Sasambo, yaitu mengajukan perlindungan hukum dengan mendaftarkan Hak Merek ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) pada tahun 2011. Berselang satu tahun kemudian, HAKI menerbitkan Hak Merek batik Sasambo sebagai nama batik milik provinsi NTB. Maskanah, kepala Kasi Kerajinan Disperindag (sekarang Dinas

Perindustrian) menuturkan bahwa hanya produk yang mewakili kepentingan orang banyak yang berhak memiliki perlindungan hukum. Artinya, tidak semua produk budaya NTB yang memperoleh perlindungan yang sama, termasuk kain tenun. Hak Merek tersebut di Sertifikat tersebut seperti yang terlihat pada foto sertifikat berikut.



Gambar II. Sertifikat Merk Batik Sasambo yang dikeluarkan oleh HAKI (Sumber: foto pribadi).

Dalam sertifikat Hak Merek tersebut tertera dengan jelas nama Sasambo. Pada halaman depan sertifikat tersebut tertera masa berlakunya 10 tahun setelah Hak Merek dikeluarkan atau berlaku sampai tahun 2022. Sementara pada bagian belakang tertera bahwa nama Sasambo diperuntukkan untuk batik, tenun dan *bedcover*. Meskipun tenun disebut dalam sertifikat tersebut, namun menurut Kasi Kerajinan Dinas Perindustrian, sertifikat tersebut hanya milik batik Sasambo. Sedangkan penyebutan tenun sebagai penanda bahwa di NTB batik dianggap turunan dari tenun. Selain itu, tenun karya masyarakat NTB belum bisa dinamakan Sasambo, sebab motif, bahan dan pewarnanya memiliki perbedaan antarsuku. Sedangkan helai kain batik Sasambo dapat menempelkan ciri khas ketiga suku sekaligus.

Pengajuan Hak Merek tersebut berdampak secara signifikan terhadap keberadaan batik Sasambo sendiri, dan juga terhadap pengrajin batik di NTB. Dengan adanya sertifikat ini, pengrajin batik lebih berani mengenalkan batik di berbagai kalangan dan kesempatan. Di sisi lain, terbitnya Hak Merek tersebut menandakan bahwa embel-embel berupa pengakuan resmi seperti sertifikat diperlukan guna menegaskan bahwa batik sedang tidak berada di daerah asalnya; Jawa. Karenanya, sesuatu yang sudah tidak berada di tempat asalnya selalu akan mengalami perbedaan, maupun adaptasi. Terbitnya Hak Merek yang dialamatkan kepada Batik Sasambo mengindikasikan bahwa pengrajin batik dan pemerintah memiliki keinginan menempel kebudayaan Jawa di NTB, sehingga membutuhkan pengakuan resmi dari penguasa.

Namun, kepemilikan Sertifikat Hak Merek tersebut pada kenyataannya hanya dialamatkan untuk DISPERINDAG saja. Sedangkan agen pertama dan kedua belum memiliki hak terhadap karyanya berupa motif. Motif batik Sasambo bukan hanya sebagai penanda identitas daerah NTB, tetapi juga secara lebih khusus sebagai pengenal untuk mendeteksi pemilik dari daerah mana motif dan tema tersebut diciptakan. Pengenal ini diperlukan karena terdapat larangan dalam hal menjiplak hasil karya orang lain, termasuk dalam hal menjiplak warna, motif maupun tema yang di batik Sasambo. Sebagai pengecualian, motif bisa dibuat oleh pengrajin lain jika disertai contoh dan diminta oleh pembeli. Larangan ini bersifat tidak resmi, akan tetapi antarpengrajin telah mengerti satu sama lain, sehingga motif yang dihasilkan oleh pengrajin satu akan berbeda dengan pengrajin lainnya. Perbedaan ini sebagai bentuk kekayaan imajinasi dan kreativitas masyarakat. Maka, pengakuan KASI Kerajinan Dinas Perindustrian mengenai latar belakang Hak Merek tersebut diajukan untuk batik.

C. SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Batik Sasambo tidak dapat dipahami semata-mata sebagai ekspresi budaya lokal yang tumbuh secara alamiah, melainkan sebagai hasil dari proses konstruksi identitas kultural yang melibatkan relasi kuasa, institusi pendidikan, dan legitimasi negara. Kemunculan Batik Sasambo sebagai simbol identitas

Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari dinamika representasi budaya yang diproduksi melalui praktik sosial para agen perubahan, khususnya civitas akademika yang berperan dalam ranah pendidikan pada masa Orde Baru.

Hasil kajian menegaskan bahwa pendidikan menjadi medium strategis dalam proses pelebagaan Batik Sasambo, di mana praktik artistik batik diperkenalkan, direproduksi, dan dimaknai ulang hingga diterima sebagai identitas kolektif tiga etnis utama di NTB—Sasak, Samawa, dan Mbojo. Identitas tersebut tidak terbentuk secara spontan, tetapi melalui proses seleksi, negosiasi, dan penyeragaman makna yang kemudian memperoleh legitimasi simbolik melalui kebijakan dan pengakuan pemerintah daerah.

Dengan demikian, batik dalam konteks Batik Sasambo tidak hanya berfungsi sebagai artefak budaya, tetapi juga sebagai praktik kultural yang aktif dalam merespons perubahan sosial, politik, dan ideologis. Penelitian ini memperlihatkan bahwa identitas budaya bersifat dinamis dan kontekstual, dibentuk melalui interaksi antara agen, struktur, dan wacana dominan. Oleh karena itu, kajian ini berkontribusi pada pengembangan studi identitas budaya dengan menempatkan batik sebagai arena representasi dan konstruksi identitas dalam masyarakat multikultural, sekaligus membuka ruang refleksi kritis terhadap peran negara dan pendidikan dalam pembentukan simbol-simbol kebudayaan lokal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan penelitian ini. Ucapan terima kasih disampaikan kepada para narasumber yang telah bersedia meluangkan waktu dan berbagi pengetahuan, sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik.

Penulis juga menyampaikan apresiasi kepada civitas akademika yang telah memberikan masukan, arahan, serta ruang diskusi yang konstruktif selama proses penelitian dan penulisan artikel ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menyediakan akses terhadap sumber data dan referensi yang relevan.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna pengembangan kajian selanjutnya.

REFERENSI

Buku

- [1] Giddens, A. (1984). *The Constitution of Society: Outline of the Theory of Structuration*. Cambridge: Polity Press.
- [2] Hayati, Ria H. (2018) *Kontestasi Narasi Identitas Nusa Tenggara Barat pada Batik Sasambo*. Depok: Universitas Indonesia.
- [3] Kartiwa, S. (1973). *Kain Tenun Tradisional Nusa Tenggara*. Jakarta: Jendral Pendidikan dan Kebudayaan.

Jurnal

- [1] Baehaqie, I., Muadzin, M., & Waskito, A. T. (2025). *Makna kultural motif batik khas Semarang: Kajian etnolinguistik*. *Jurnal Basataka (JBT)*, 8(2), 2066–2075. <https://doi.org/10.36277/basataka.v8i2.1085>
- [2] Candra, I. A. I. (2021). *Analisis motif batik Maluku dalam membangun pendidikan multikultural*. *Imaji: Jurnal Seni dan Pendidikan Seni*, 19(2), 133–142. <https://doi.org/10.21831/imaji.v19i2.44285>
- [3] Dewi, P., & Budiwirman, B. (2020). *Analysis of the symbolic meaning and cultural identity in Sarolangun batik arts Jambi Province*. *International Journal of Educational Dynamics*, 2(2), 10–18. DOI:10.24036/ijeds.v2i2.266.
- [4] Fikriyah, F. N., Pramana Koesoemadinata, M. I., & Trihanondo, D. (2024). *Motif batik sebagai representasi budaya pada revitalisasi interior Gedung Sarinah Jakarta*. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 9(11). <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v9i11.16913>
- [5] Habib Aisyah Intan et al. (2024). *Batik Semarang on Cultural Ecology Perspective: Characteristic of Visual Expression*. *Catharsis*, 12(2). DOI: <https://doi.org/10.15294/catharsis.v12i2.76364>
- [6] Kapeanis, A., Iswatiningsih, D., Rohmah, S. A., & Dewi, P. C. (2025). *Makna filosofis motif Batik sebagai identitas budaya masyarakat Lebak*. *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial dan Budaya*, 14(2)
- [7] Kartiwa, S. (1973). *Kain Tenun Tradisional Nusa Tenggara*. Jakarta: Jendral Pendidikan dan Kebudayaan.
- [8] Putri, D., & Izzati, F. (2021). *Makna simbolis motif Batik produk Rumah Batik Minang di Nagari Panyakalan Kabupaten Solok Sumatera Barat*. DESKOVI: Art and

Design Journal, 4(1), 43–48.
DOI:10.51804/deskovi.v4i1.966

- [9] Safitri, A. I., Sudarmawan, A., & Sudita, I. (2017). *Batik Sasambo di Desa Rembitan, Pujut, Lombok Tengah: Motif dan maknanya dalam kehidupan masyarakat lokal*. *Jurnal Pendidikan Seni dan Pendidikan Seni Rupa*, 7(1). <https://doi.org/10.23887/jjpsp.v7i1.11399>
- [10] Shah, G. I. F., Pujaastawa, I. B. G., & Aliffiati. (2025). *Makna dan fungsi Batik Sasambo bagi masyarakat Desa Rembitan, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat*. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 7(7). <https://doi.org/10.6578/triwikrama.v7i7.11610>
- [11] Zuhro, A. R. (2024). *Perkembangan desain batik kontemporer sebagai transformasi artistik dalam dinamika sosial budaya modern*. *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan*, 7(1), 115–128.

Artikel

- [1] Galih, B (2017). *2 Oktober 2009, UNESCO Akui Batik sebagai Warisan Dunia dari Indonesia* https://nasional.kompas.com/read/2017/10/02/08144021/2-oktober-2009-unesco-akui-batik-sebagai-warisan-dunia-dari-indonesia?utm_source

Wawancara

- [1] Ahyar. 2018. Diwawancarai oleh Ria Hikmatul Hayati. SMKN 5 Mataram
- [2] Samsir. 2018. Diwawancari oleh Ria Hikmatul Hayati. Desa Sade.